

A. STUDI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KOTA BANDUNG

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengentaskan wajib belajar pendidikan dasar (Wajardikdas 9 tahun) pada tahun 2008/2009, khususnya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, dilakukan melalui model layanan pendidikan inklusif. Dalam melaksanakan upaya tersebut, Pemerintah propinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan sejak tahun 2003 melakukan piloting penyelenggaraan model layanan pendidikan inklusif di 75 Sekolah Dasar reguler di 25 kabupaten kota, dan kota Bandung sebagai ibu kota propinsi diujicobakan model layanan pendidikan inklusif ini di 3 (tiga) sekolah.

Piloting model layanan pendidikan inklusif di kota Bandung, telah berjalan selama 3 (tiga) tahun, karena piloting di kota Bandung dilaksanakan lebih dahulu daripada kota-kota yang lain. Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ini kegiatan piloting sudah menunjukkan suatu perjalanan panjang, dan belum pernah dilakukan evaluasi yang komprehensif yang melibatkan unsur perguruan tinggi sebagai mitra kerja.

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan melalui kepala sekolah dan guru disekolah yang dijadikan piloting, diperoleh informasi tentang berbagai permasalahan yang terjadi. Mereka kebingungan mengenai layanan yang bagaimana yang seharusnya diberikan kepada anak yang sangat bervariasi, kurangnya jalinan yang harmonis antara Dinas Pendidikan yang berfungsi sebagai pembina dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, sehingga membuat sekolah menjadi kesulitan untuk mengembangkan pendidikannya, belum adanya kejelasan dalam sistim evaluasi sehingga bagaimana follow up nya apabila anak-anak berkebutuhan khusus telah menyelesaikan pendidikannya, dan permasalahan-permasalahan lainnya yang cukup merepotkan selama penyelenggaran pendidikan.

Jurusan Pendidikan Luar Biasa FIP UPI sebagai Pusat Sumber Pengkajian Pengembangan Pendidikan Inklusif (PSP3I) memiliki kewajiban

dan tanggungjawab untuk membantu mitranya (Dinas Pendidikan dan sekolah-sekolah piloting) dalam mendukung kelancaran proyek piloting tersebut. Maka melalui studi evaluasi diharapkan dapat ditemukan bagaimana penyelenggaraan piloting pendidikan inklusif yang terjadi secara obyektif di lapangan.

Penyelenggara piloting model layanan pendidikan inklusif di kota Bandung merupakan sekolah-sekolah mitra bagi jurusan PLB UPI, selain itu keberadaan anak bervariasi jika dibandingkan dengan sekolah yang ada di luar kota Bandung.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena yang telah diuraikan maka dirasakan perlu untuk diadakan studi evaluasi terhadap penyelenggaraan piloting model layanan pendidikan inklusif, khususnya di kota Bandung yang merupakan senter dari pemerintahan propinsi Jawa Barat.

C. Perumusan Masalah

Wajib belajar pendidikan dasar (Wajardikdas) 9 tahun merupakan issue nasional yang harus menjadi tanggung jawab semua komponen bangsa, terlebih Departemen Pendidikan Nasional dan pemerintah daerah. Pemerintah dalam mengejawantahkan program ini sedang melakukan berbagai upaya, baik melalui program peningkatan akses (daya tampung), peningkatan mutu, maupun melalui program peningkatan penyelenggaraan pendidikan, termasuk didalamnya pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus.

Model penyelenggaraan pendidikan inklusif merupakan gagasan cerdas sebagai salah satu alternatif dalam upaya program peningkatan akses (daya tampung) dalam pengentasan wajardikdas 9 tahun untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Pemerintah propinsi Jawa Barat melalui Subdin PLB Dinas Pendidikan dalam mengejawantahkan program peningkatan akses untuk anak berkebutuhan khusus telah dilaksanakan melalui penyelenggaraan model pendidikan inklusif. Sebelum program ini digulirkan, pemerintah

daerah propinsi Jawa Barat terlebih dahulu melakukan piloting penyelenggaraan pendidikan inklusif di 25 kabupaten kota, termasuk di kota Bandung.

Piloting penyelenggaraan model pendidikan inklusif di propinsi Jawa Barat, termasuk di kota Bandung telah berlangsung selama tiga tahun, dan dalam kurun waktu tersebut belum ada lembaga independen termasuk perguruan tinggi yang melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program tersebut.

Berkenaan dengan program piloting tersebut, jurusan PLB FIP UPI sebagai lembaga pengkajian pengembangan pendidikan inklusif dan sekaligus sebagai mitra Dinas Pendidikan dan sekolah penyelenggara piloting ujicoba memiliki kepentingan untuk melakukan studi evaluasi mengenai pelaksanaan penyelenggaraan program piloting tersebut sehingga dari hasil studi evaluasi tersebut dapat dijadikan masukan dalam pengembangan model pendidikan inklusi, dan diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi sekolah mitra dan pemerintah dalam hal ini Dinas pendidikan dalam melaksanakan dan menggulirkan program ini dalam skala yang lebih luas.

Berdasarkan kepentingan itulah jurusan PLB FIP UPI ingin mendalami secara seksama bagaimana pelaksanaan penyelenggaraan piloting pendidikan inklusif di kota Bandung, dengan fokus studi evaluasi terhadap:

1. Bagaimana kesiapan sekolah penyelenggara program piloting pendidikan inklusif di kota Bandung? dalam hal ini:
 - a. Bagaimana pemahaman personal penyelenggara piloting (kepala sekolah, guru, staf TU, orangtua, komite sekolah) terhadap subyek didik atau anak berkebutuhan khusus (ABK)?
 - b. Bagaimana pemahaman personal penyelenggara piloting (kepala sekolah, guru, staf TU, orangtua, komite sekolah) terhadap konsep pendidikan inklusif?

2. Bagaimana aktualisasi penyelenggaraan program piloting pendidikan inklusif di sekolah di kota Bandung? dalam hal ini:
 - a. Bagaimana model layanan dan setting kelas yang dikembangkan guru dalam layanan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus yang belajar di tengah-tengah komunitas anak pada umumnya?
 - b. Bagaimana guru memahami setiap potensi siswa yang berkebutuhan khusus?
 - c. Bagaimana guru mengembangkan program pembelajaran yang diindividualisasikan dalam setting program pembelajaran layanan klasikal?
 - d. Bagaimana guru mengembangkan sarana dan prasarana serta media pembelajaran yang dibutuhkan anak berkebutuhan khusus di tengah-tengah pengembangan sarana dan prasarana serta media pembelajarn dalam layanan klasikal?
 - e. Bagaimana guru mengakomodasi perbedaan individual yang sangat mencolok dalam setting pemberian pelaksanaan layanan pembelajaran klasikal?
 - f. Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang ramah (pengelolaan kelas) untuk semua siswa dalam setting komunitas belajar anak pada umumnya?
 - g. Bagaimana guru merancang dan melakukan serta mengembangkan evaluasi pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus?
 - h. Bagaimana guru mengembangkan bimbingan individual untuk siswa berkebutuhan khusus?
3. Bagaimana faktor pendukung penyelenggaraan program piloting pendidikan inklusif di sekolah-sekolah kota Bandung? dalam hal ini:
 - a. Apa dan bagaimana kebijakan yang dikembangkan pemerintah, sekolah dan guru dalam mendukung kelancaran program piloting?
 - b. Bagaimana jaringan kerja (networking) yang dikembangkan guru maupun sekolah dalam mendukung kelancaran program piloting?

- c. Bagaimana pengembangan pembinaan kompetensi guru yang dilakukan sekolah ataupun pemerintah?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan studi ini adalah melakukan evaluasi yang komprehensif terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan piloting pendidikan inklusif di kota Bandung. Hasil studi evaluasi ini sebagai informasi dalam mengembangkan model pendidikan inklusif di jurusan PLB FIP UPI, juga digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan akses (daya tampung) untuk anak berkebutuhan khusus di kota Bandung. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mendapatkan gambaran kondisi personal pelaksana piloting pendidikan inklusif (kepala sekolah, guru, staff tata usaha, orangtua, komite sekolah) di setiap sekolah yang dijadikan piloting dalam pemahaman subyek didik (anak berkebutuhan khusus).
2. Mendapatkan gambaran tentang pemahaman kepala sekolah, guru kelas, itenerant, staff TU, orangtua, komite sekolah dan personal sekolah lainnya terhadap rambu-rambu atau petunjuk pelaksanaan pendidikan inklusif.
3. Mendapatkan gambaran tentang pemahaman personal penyelenggara piloting (kepala sekolah, guru kelas, itenerant, staff TU, orangtua, komite sekolah dan personal sekolah lainnya) terhadap konsep pendidikan inklusif.
4. Mendapatkan gambaran mengenai penyelenggaraan pembelajaran dan pengadministrasian yang dikembangkan sekolah piloting (model asesmen, media, penciptaan lingkungan belajar (pengelolaan kelas), asesibilitas, evaluasi hasil belajar, sistem pelaporan (akuntabilitas publik), dan program bimbingan yang dikembangkan).
5. Mendapatkan gambaran mengenai kurikulum yang digunakan siswa berkebutuhan khusus (perencanaan (renpel), cara pendekatan,

metodologi, adaptasi content, pengelolaan pembelajaran, sistem evaluasi yang digunakan, daya serap atau tingkat penguasaan kompetensi).

6. Mendapatkan gambaran mengenai daya dukung penyelenggaraan piloting (kebijakan-kebijakan sekolah maupun pemerintah, pengembangan jaringan kerja (networking), dan pembinaan kompetensi guru).

Sedangkan manfaat hasil studi evaluasi terhadap piloting pelaksanaan pendidikan inklusif antara lain adalah:

1. Dapat dijadikan masukan untuk melakukan tidak lanjut penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam rangka peningkatan akses untuk siswa berkebutuhan khusus.
2. Dapat dijadikan masukan dalam mengembangkan model pendidikan inklusif dan pembuatan kebijakan-kebijakan yang berkait dengan penerapan pendidikan inklusif dalam skala yang lebih luas
3. Dapat dijadikan masukan bagi para pelaksana pendidikan inklusif untuk meningkatkan peran dan fungsinya sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesionalitas yang produktif.

E. Kajian Pustaka

Pendidikan Inklusif

Perubahan pandangan dan pengakuan terhadap eksistensi serta hak-hak azasi manusia (*human being*) berdampak terhadap paradigma dalam pendidikan yang selama kita anut. Sebagaimana kita ketahui dalam dunia pendidikan khususnya, arah pendidikan sekarang ini adalah memihak pada semua orang, seperti yang dinyatakan UNESCO dalam Deklarasi tentang Pendidikan untuk Semua (*Education for All*) di Jomtien, Thailand tahun 1990. Deklarasi ini kemudian diperkuat lagi dengan Deklarasi Salamanca (1994) dan Dakkar (2000). Salah satu kelompok yang menjadi target dalam Pendidikan untuk Semua adalah anak-anak dan orang dewasa yang berkebutuhan khusus. Mereka ini menjadi sasaran target, karena selama ini terpinggirkan, terisolasi dan kurang mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh

karena itu, untuk menindaklanjuti Konferensi Dunia mengenai Pendidikan Kebutuhan Khusus yang paling akhir di Dakar tahun 2000 tersebut, Pendidikan Inklusif ditetapkan sebagai satu prinsip dalam memenuhi kebutuhan belajar anak-anak berkebutuhan khusus (Dalen, Monica dalam Johnson, 2003).

Pendidikan inklusif tidak hanya berarti mengintegrasikan anak-anak berkebutuhan khusus kedalam sekolah reguler (umum) atau hanya akses pendidikan bagi mereka yang terisolir, tetapi pendidikan inklusif merupakan sebuah proses dua arah untuk meningkatkan partisipasi dalam belajar dan mengidentifikasi serta mengurangi atau menghilangkan hambatan untuk belajar dan berpartisipasi. Dalam implikasinya, pendidikan inklusif menyediakan kesempatan seluas-luasnya kepada semua peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersama-sama menikmati layanan pendidikan dalam setting pembelajaran, dan sistem pendidikannya menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Sehingga yang dipertanyakan oleh sekolah, bukan lagi “Dapatkah kita menyediakan pelayanan bagi kebutuhan siswa?”, melainkan “Bagaimana kita menyediakan pelayanan bagi siswa berkebutuhan khusus?”. Foremen (2001).

Dalam pendidikan inklusif diperlukan adanya fleksibilitas, kreativitas, dan sensitivitas dari lingkungan terhadap anak berkebutuhan khusus. Seperti yang dikemukakan Johnsen dan Skorten (2003:48) bahwa dalam lingkungan masyarakat inklusif, kita siap mengubah dan menyesuaikan sistem, lingkungan dan aktivitas yang berkaitan dengan semua orang serta mempertimbangkan kebutuhan semua orang. Bukan lagi anak yang menyandang kecacatan yang harus menyesuaikan diri agar cocok dengan setting yang ada. Untuk itu diperlukan fleksibilitas, kreativitas dan sensitivitas.

Dengan demikian melalui pembelajaran, siswa akan belajar mengembangkan dirinya, dan bekerjasama satu dengan yang lainnya.

Proses perubahan ke arah pendidikan inklusif, tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan

dalam perubahan menuju inklusi, seperti: (1) sikap dan nilai-nilai yang ada, (2) kurangnya pemahaman, (3) dan organisasi yang tidak sesuai (UNESCO, 2005:20)

Sekolah yang Ramah

Peserta didik kita, memiliki kemampuan dan karakteristik yang beragam dan ini adalah modalitas yang akan dikembangkan dalam layanan pendidikan. Agar sekolah dapat menerima kehadiran anak-anak dalam seting pendidikan maupun pembelajaran sebagaimana yang dimilikinya, maka sekolah perlu menjadikan dirinya sebagai sekolah yang ramah (*wecoming school*). Sebagaimana dinyatakan Permanarian Somad (2004) untuk menuju sekolah yang ramah tidak harus membuat revolusi, akan tetapi melakukan secara evolusi yang dipercepat, terencana dengan menetapkan target secara jelas. Sekolah yang ramah adalah sekolah yang diperuntukkan bagi semua siswa tanpa kecuali. Lebih lanjut dikatakan, ada hal-hal yang perlu dan harus ada dalam sekolah yang ramah:

(1) Kesiediaan dan kemauan menerima siswa tanpa kecuali. Warga sekolah yaitu Kepala Sekolah, guru dan siswa merupakan unsur-unsur penentu terciptanya sekolah yang ramah. **Kepala Sekolah** selaku manajer pendidikan perlu bijak dan mensosialisasikan pada staf untuk menerima kehadiran siswa berkebutuhan khusus. **Guru** dituntut untuk memahami adanya keragaman individu, memiliki toleransi yang tinggi, empati, dan memiliki kesiapan untuk mengajar anak-anak berkebutuhan khusus. **Kolaborasi siswa** merupakan cara terbaik bagi perkembangan siswa untuk dapat benar-benar terlibat dalam peningkatan kualitas akademik dan sosial bagi anak berkebutuhan khusus di kelasnya. Tidak termasuk warga sekolah, tetapi mempunyai peran penting yaitu orang tua. Keterlibatan orang tua merupakan sesuatu yang penting dalam upaya pengembangan anaknya di sekolah. Adanya kerjasama antara guru-guru dan orang tua, sehingga keduanya memiliki program yang sama dalam mengembangkan potensi anak secara optimal.

(2) Aksesibilitas lingkungan sekolah. Penataan lingkungan fisik, termasuk didalamnya penataan kelas, dalam hal ini membutuhkan adaptasi, misalnya untuk kursi roda, atau kursi untuk guru pembimbing. Lingkungan belajar tidak membahayakan anak-anak, letak sekolah atau sekolah yang ada dapat dibuat ramah. Yang paling penting adalah ruangan kelas tempat untuk belajar dan mengajar dapat berjalan efektif bagi semua anak. Empat hal yang merupakan kunci dari kelas yang ramah adalah materi, program, sikap guru dan siswa sebagai suatu kelompok. Membangun suasana kelas yang dapat menciptakan anak termotivasi untuk belajar, memberi kesempatan kepada anak untuk berperan sehingga anak merasa menjadi bagian dalam kelompok merupakan bagian dalam manajemen kelas. Disamping itu, membangun interaksi dan komunikasi antara sesama orang tua, guru dengan orang tua, sesama anak, guru dengan sesama anak akan lebih mendukung terciptanya aksesibilitas.

(3) Fleksibilitas Kurikulum dan Pendekatan Pembelajaran. Dalam memberikan layanan kepada semua anak digunakan kurikulum yang sifatnya fleksibel yang mampu merespon keragaman kebutuhan anak. Dengan memberikan kesempatan pada anak berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler akan berdampak terhadap kurikulum sekolah, walaupun pada kenyataannya kurikulum sekolah reguler sangat ditentukan oleh kurikulum yang ditetapkan pemerintah, oleh karena itu perlu disusun silabi dan pendekatan pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Kesulitan dalam kurikulum adaptasi ini adalah menemukan kebutuhan anak. Ada tiga faktor yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan kurikulum fleksibel, yaitu: guru, siswa, dan sumber belajar..

Kurikulum yang inklusif penekannya mencakup sampai keadaan di kelas yang mampu mengakomodasi keragaman dan kebutuhan anak, untuk itu diperlukan modifikasi kurikulum. Terdapat tiga alternatif kurikulum yang mendasar untuk melayani tingkat partisipasi siswa berkebutuhan khusus dalam kelas reguler, yaitu: (1) Kesamaan; kesamaan fokus, sasaran dan kegiatan. (2) Multi level, kesamaan kurikulum dalam menetapkan kegiatan

akan tetapi pada level yang lebih rendah dengan menggunakan PPI yang didasarkan pada hasil asesmen, dan (3) Kurikulum overlap, kesamaan kegiatan akan tetapi fokus yang berbeda.

Pendapat lain menyatakan, ada sekurang-kurangnya lima dimensi yang mendukung terciptanya sekolah yang ramah, yaitu : (1) Secara pro-aktif menjangkau anak berkebutuhan khusus di sekitar lingkungan sekolah, (2) Efektif bagi anak untuk belajar, dan berpusat pada anak, (3) Suasana sekolah sehat, melindungi dan aman bagi anak, (4) Responsif terhadap jender untuk kesetaraan, dan (5) Mengundang partisipasi siswa, orang tua dan masyarakat. (Nn, 2004). Penyiapan semua personalia kependidikan secara tepat merupakan faktor kunci dalam mempercepat kemajuan ke arah terselenggaranya sekolah-sekolah inklusif. Dan, penerimaan guru-guru yang menyandang kecacatan yang dapat berfungsi sebagai model peran (role-models) bagi anak-anak semakin diakui pentingnya. Sedangkan untuk mengembangkan sekolah inklusif yang dapat melayani sejumlah siswa, menuntut adanya: (1) Penetapan kebijakan yang jelas dan tegas mengemai inklusi disertai penyediaan dana yang memadai. (2) Memberikan pemahaman yang efektif terhadap masyarakat untuk menghilangkan purbasangka dan menciptakan sikap positif. (3) Program orientasi dan pelatihan staf yang intensif. Dan (4) Menyediakan berbagai layanan pendukung yang diperlukan.

Kompetensi Guru

Ujung tombak layanan pendidikan inklusif di lapangan, gurulah orangnya. Guru senantiasa dituntut untuk mampu berdialog dengan siswanya, mendorong terjadinya interaksi diantara anak-anak, mengupayakan agar sekolah menjadi tempat yang menyenangkan. Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan keragaman di kelasnya sehingga dapat mendiasain pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak.

Dalam pembelajaran, guru berperan sebagai fasilitator dan motivator sehingga dapat mendorong terjadinya pembelajaran aktif pada semua anak. Skorten (2003) mengemukakan lima hal yang harus diupayakan guru dalam pelaksanaan pendidikan inklusif: (1) Menunjukkan perasaan positif, tunjukkan bahwa anda menyayangi anak tersebut. (2) Sesuaikan dengan kondisi anak dan ikuti keinginan mereka, bahas dengan anak tersebut tentang hal-hal yang berkaitan dengannya, dan upayakan untuk bisa berdialog dengan ekspresi, perasaan teratur dan suara yang ramah. (3) Berikan pujian dan pengakuan dari hal-hal yang biasa dilakukan anak, bantu anak untuk memfokuskan perhatiannya sehingga anda dapat bersama-sama berkembang dalam lingkungannya sendiri. (4) Jelaskan secara logis dan praktis tentang pengalaman anak di dunia luar dengan menggambarkan hal-hal yang dialami bersama-sama dan tunjukkan perasaan antusias. Dan (5) Jabarkan dan jelaskan hal-hal yang anda alami bersama-sama anak, bantu anak untuk mengontrol sendiri dengan menetapkan batasan dengan cara positif, dengan mengarahkannya, memberikan alternatif dan dengan merencanakan hal-hal bersama-sama.

F. Metode, Teknik dan Lokasi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analitik, dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipegunakan karena permasalahan yang dikaji aktual yang perlu dianalisis, dideskripsikan dan kemudian diinterpretasikan secara obyektif berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang diharapkan dapat menggali dan mengungkap data-data tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di kota Bandung secara nyata, obyektif karena peneliti akan berusaha dalam sistem penyelenggaraan pendidikan

Lokasi Penelitian

Ada tiga sekolah dasar di kota Bandung yang dijadikan tempat penelitian, yaitu SDN Gegerkalong, SDN Sejahtera, dan SD BPI

G. Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar” (Moleong, L., 1980). Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan analitical induction, ini dikandung maksud bahwa setelah data terhimpun langsung akan dilakukan pengolahan dengan melakukan penafsiran dan menganalisis secara kritis, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan secara bertahap dan dilakukan pembahasan hingga mencapai tujuan yang diharapkan

H. Jadwal

No	Jenis kegiatan	Mrt	April	Mei	Juni	Juli	Agts	Spt	Okt	Nov	Des
1.	Studi pendahuluan	XXX									
2.	Penyusunan Proposal Penl	XXX									
3.	Seminar Proposal		XXX								
4	Revisi Proposal		XXX								
5	Penyusunan Instrumen		XXX	XXX							
6.	Pengumpulan Data			XXX	XXX	XXX	XXX				
7.	Pengolahan Data			XXX	XXX	XXX	XXX				
8.	Penyusunan hasil penelt							XXX	XXX		
9.	Seminar hasil penelitian									XXX	
10.	Pelaporan hasil penelt										XXX

I. Personalia:

Ketua : Drs. Musjafak Asjari, M.Pd.

Anggota :

1. Dra. Permanarian Somad, M.Pd.
2. Drs. Endang Rusyani, M.Pd.
3. Drs. Atang Setuawan, M.Pd.
4. Siswanti (Mahasiswa)
5. D u d u y (Mahasiswa)

J. Perkiraan Biaya

1	Persiapan		
	a. ATK	Rp. 500.000,00	
	b. Seminar	Rp. 500.000,00	
	c. Penyusunan Draf Instrumen	Rp. 500.000,00	
	d. Ujicoba Instrumen	Rp. 500.000,00	
	e. Revisi Instrumen	Rp. 250.000,00	
	Pelaksanaan		
	a. Pengambilan data	Rp. 1.000.000,00	
2	b. Verifikasi data	Rp. 500.000,00	
.	c. Pengolahan data	Rp. 500.000,00	
	d. Penyusunan hasil	Rp. 500.000,00	
	Seminar Hasil Studi Kajian	Rp. 500.000,00	
	Penyusunan hasil	Rp. 500.000,00	
3	Pelaporan	Rp. 750.000,00	
.	Honorarium dan Uang Saku		
	a. Ketua 1 x (6 bln x 400.000)	Rp. 2.400.000,00	
	b. Anggota 2 x (6 bln x 350.000)	Rp. 4.200.000,00	Rp.13.100.000,00
3.	Lain-lain		
	a. Transportasi ke Lapangan		
	- Ketua 1 x 400.000	Rp. 400.000,00	
	- Anggota 2 (300.000)	Rp. 600.000,00	
	b. Penyusunan dan Pelaporan	Rp. 500.000,00	
	c. Desiminasi Hasil	Rp. 400.000,00	1.900.000,00
			Rp.15.000.000
			(Lima Belas Juta
			Rupiah
	JUMLAH KEBUTUHAN BIAYA		